*Draft Proposal Disertasi
Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan
Universitas Gadjah Mada*

Membuka Ruang Teorisasi Kepemimpinan Masyarakat Sipil:

Komunitas Epistemik Sains Terbuka

Cahyo Seftyono
18/435554/SMU/01219

Promotor: Prof. Purwo Santoso, PhD
Co Promotor: Prof. Muhadjir Muhammad Darwin, MPA
Dr. Agus Heruanto Hadna, MSi

Penelitian ini menjelaskan gejala politik masyarakat sipil baru. Masyarakat sipil sebagai gerakan politik merupakan kajian yang masih menjadi perdebatan, khususnya antara madzhab Tocqueville-an dan Gramsci-an. Penelitian ini mencoba memberikan ulasan berbeda dengan menjelaskan fenomena Komunitas Epistemik Sains Terbuka. Melalui pelacakan data kualitatif dan wawancara, ditunjukkan bahwa sebagai masyarakat sipil komunitas ini tidak memposisikan diri sebagai lawan maupun partner bagi pemerintah. Lebih jauh bahwa sesungguhnya keduanya lebih mementingkan terwujudnya gagasan yang mereka usung, keterbukaan dan profesionalisme publikasi. Baik gagasan itu merupakan usulan mereka, maupun gagasan yang muncul dari pihak pemerintah. Pemerintah dalam hal ini tidak saja kemenristekdikti, melainkan lembaga-lembaga riset di bawah kementerian dan komisi lain yang merepresentasi pemerintah seperti Komisi Informasi Pusat. Pelacakan irisan gagasan sebagai penggerak organisasi ditengarai merupakan bentuk kepemimpinan masyarakat sipil baru. Bergerak dari personifikasi aktor-aktor menjadi perdebatan gagasan.

Masyarakat sipil di Indonesia perlu dianalisis ulang. Dengan mengambil kasus Komunitas Epistemik Sains Terbuka, tulisan ini akan memperlihatkan: (1) Gap teoritik yang ada terkait masyarakat sipil dan kelahiran ide atau diskursus di ruang publik sebagai penggerak kerja masyarakat sipil dalam berinteraksi dengan negara dan pasar. Merujuk pada ruang publik yang menjadi arena masyarakat sipil melalui interaksi mereka dengan negara dan pasar dalam merespon wacana global dan sekaligus kebijakan nasional dan (2) Diskursus terkait kepemimpinan ide yang menjadi bagian transformasi kepemimpinan berbasis aktor, menuju kepemimpinan berbasis interaksi. Termasuk bagaimana kebijakan publikasi ilmiah direspon oleh aktor-aktor dengan kesiapan, prinsip kerja dan sumber daya yang berbeda-beda. Sebagai bagian dari interaksi masyarakat sipil, negara dan pasar/ekonomi.

Sempitnya Ruang Gerak Karena Sempitnya Teorisasi: Sebuah Pendahuluan

Masyarakat Sipil: Dari Interaksi Aktor ke Diskursus Ide

Kekinian politik dan demokrasi yang berkembang memunculkan salah satu perbincangan yang paling sentral tentang konsep masyarakat sipil. Unsur di luar negara dan pasar yang memiliki pengaruh sosial politik. Keberadaannya dianggap menjadi solusi bagi persoalan-persoalan demokrasi. Hal ini disebabkan masyarakat sipil menjadi representasi publik dalam menghadapi negara yang sudah diberi mandat secara legal formal menjalankan kekuasaan rakyat.

Masyarakat sipil yang hadir sejalan dengan adanya penguatan liberalisme dan demokrasi tersebut memungkinkan adanya partisipasi di ruang publik. Rakyat yang semula telah menyerahkan legitimasi hak-nya kepada negara menjadi memiliki kembali kontrol atas pelaksanaan legitimasi tersebut. Pada prosesnya terjadi dialog di ruang publik antara negara dan non negara (dalam hal ini masyarakat sipil dan pasar) untuk menentukan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Masyarakat sipil sebagai bagian dari demokrasi liberal tidak memberikan kekuasaan yang penuh bagi negara untuk melakukan

hal-hal yang ingin dikerjakan mereka. Masyarakat sipil dalam hal ini memungkinkan publik menjadi terlibat lebih aktif dalam proses-proses kebijakan yang ada. Tocqueville (1982) menyebutkan bahwa masyarakat sipil merupakan sekolah demokrasi yang pada akhirnya akan membentuk demokrasi yang lebih dinamis. Dengan adanya asosiasi-asosiasi yang bebas, masyarakat memiliki keterikatan pada isu-isu yang secara langsung bersinggungan dengan mereka: hidup, kebebasan dan kepemilikan.

Menggunakan logika Tocqueville-an, maka akan kita dapati bahwa semakin kuatnya masyarakat sipil dalam mengontrol negara menjadikan demokrasi yang ada semakin baik. Hal ini menjadi masukan atas pendekatan kebijakan publik yang selama ini dominan terkait dengan pemaknaan kebijakan yang negara sentris. Kebijakan adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan (oleh pemerintah). Pandangan yang seperti ini menjadikan pemerintah seolah sebagai elemen satu-satunya dalam proses kebijakan, yang mana pada hakikatnya terdapat elemen lain yang juga terlibat di dalam proses tersebut. Terdapat diskursus gagasan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan.

Diskursus proses kebijakan sendiri pada dasarnya merupakan interaksi antara negara dan elemen lainnya di ruang publik. Jika ditelisik lebih jauh, fenomena ruang publik yang kian dinamis ini tidak dapat dilepaskan dari kelahirannya pada akhir abad ke-17. Perkembangan ruang publik pada abad ke-18 meniscayakan ada interaksi yang kuat, intens dan dinamis. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Habermas terkait dengan jejaring aktor di era revolusi Industri Eropa (Habermas dkk, 1974; Hohendahl dan Silberman, 1979). Jejaring aktor memungkinkan kemunculan gagasan-gagasan dominan di aras lokal untuk kemudian dimunculkan dalam perdebatan para elit pembuat kebijakan.

Elit, yang identik dengan pemimpin kelompok, muncul sebagai konsekuensi interaksi antara pemilik modal dengan pekerja juga membuka pandora lain terkait apa saja sarana yang digunakan untuk menguatkan pengaruh di antara mereka. Habermas membawakan gagasan ruang publik borjuis, ruang dimana hanya aktor-aktor dengan sumber daya tertentu yang akan saling

berinteraksi dan menguatkan dalam rangka menjaga bisnis mereka di ruang publik. Dengan kata lain, masyarakat sipil menjadi representasi publik sesuai dengan kepentingan sosial politik masing-masing.

Kepentingan yang dimunculkan oleh masyarakat sipil selain hasil interaksi horisontal antar bagian di dalam masyarakat, juga merupakan respon atas minimnya perhatian pemerintah dari pembahasan atas isu yang berkembang. Selain karena untuk menjaga sumber daya, kebutuhan atas kepentingan yang lebih luas perlu disuarakan agar masyarakat sipil menjadi lebih kuat dan semakin banyak pendukung. Imbasnya, partisipasi mereka atas kebijakan yang akan diambil oleh negara menjadi lebih dinamis. Partisipasi di sini tidak melulu dengan melakukan *positioning* oposan, melainkan juga dapat berlaku sebagai partner dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Dilema dalam melihat interaksi antara negara, masyarakat sipil dan pasar muncul ketika masyarakat sipil sudah diposisikan sebagai oposan dari negara dan pasar karena keberadaan formal mereka. Imbasnya, penerimaan akan gagasan yang bisa saja serupa dengan negara (dan pasar) serta merta akan ditolak karena *positioning* masing-masing tersebut. Padahal, realitas yang ada memungkinkan adanya ruang untuk kesamaan ide dari masing-masing aktor. Apa yang menjadi gagasan masyarakat sipil sebagai kebijakan berdampak untuk publik maka itu perlu diapresiasi. Mengingat konteks kekinian masyarakat sipil di Indonesia memungkinkan keterlibatan lintas aktor dalam elemen-elemen yang berpartisipasi dalam ruang publik. Terdapat multi peran dari setiap aktor yang berinteraksi di ruang publik. Baik secara fisikal maupun ide.

Hal yang semakin kompleks terkait masyarakat sipil ketika saat ini batas-batas regional dan aktivitas masing-masing aktor tidak dapat disekat dalam satu teritori tertentu. Termasuk dengan siapa mereka terkoneksi. Artinya kepentingan dan gagasan yang dimiliki melampaui kepentingan yang lebih lokal atau nasional, juga kepentingan yang sedang di bawa. Semakin kuat jejaring yang dimiliki, maka akan berdampak pada semakin kuat pula pengaruh dan sebaliknya. Aktivitas yang serba tidak formal dan cair ini

membuat partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan di ruang publik menjadi lebih dinamis. Di satu sisi, mereka bisa menempatkan diri sebagai aktor lokal di saat yang sama sebenarnya juga merupakan jejaring internasional (Widjajanto, 2007). Di satu saat independen, di saat yang sama juga bisa menjadi perwakilan pasar dan negara.

Ruang publik kebijakan yang memunculkan elit-elit politik pada dasarnya juga menjadi bagian yang penting dalam proses interaksi masyarakat dengan negara. Termasuk di dalamnya juga entitas pasar. Dengan kondisi yang demikian, maka pelaksanaan proses kebijakan memerlukan satu kepemimpinan yang dapat menyatukan berbagai kepentingan. Kepemimpinan sendiri selama ini identik dengan aktor, yang dapat berasal dari negara, pasar maupun masyarakat sipil. Akan tetapi pada realitasnya, kepemimpinan tidak melulu merujuk pada aktor tertentu. Terdapat irisan-irisan kepentingan dan gagasan yang mana hanya dapat disatukan ketika pembacaan atas partisipasi di ruang publik ini tidak dinilai sebagai partisipasi aktor, melainkan perdebatan gagasan.

Kepemimpinan Ide Masyarakat Sipil: Kepemimpinan Kolektif dan Interaktif

Gagasan tentang kepemimpinan secara umum dipahami bermula dari relasi manajerial dan juga pelayanan, mendapat tantangan atas fenomena ini. Ditambah dengan ruang publik yang saat ini menjadi tidak lagi sepenuhnya fisik, maka keberadaan diskursus kepemimpinan menjadi penting. Aktor-aktor dalam relasi kepemimpinan sebagaimana yang disajikan dalam berbagai literatur menjadi tidak lagi sentral perannya, mengingat mereka saat ini tidak lagi harus bertemu satu sama lain untuk dapat bekerja sama. Terdapat pola kerja yang cenderung memikirkan kesamaan gagasan dibandingkan dengan siapa yang lebih otoritatif dalam menjalankan ide.

Isu-isu tentang kepemimpinan saat ini adalah lebih kepada penemuan solusi dan bukan bagaimana relasi aktor yang terlibat dalam sebuah sistem. Bahwa pemimpin sebagai aktor itu tetap ada iya, namun demikian yang menjadi bagian penting dalam sebuah

kepemimpinan justru bagaimana masing-masing aktor terikat satu sama lain dengan tujuan yang sama. Di sisi lain lebih kepada bagaimana satu aktor memberikan pengaruh kepada aktor yang lain sehingga sistem atau organisasi yang dijalankan bersama menjadi aktif. Kepemimpinan bergeser dari atasan bawahan, menjadi kepemimpinan yang bersifat dialog gagasan dan interaksi yang dinamis, yang juga identik dengan kepemimpinan disruptif (Bower dan Chistensen, 1995; Raelin, 2016).

Kepemimpinan yang interaktif dan kolaboratif memungkinkan munculnya pengaruh di luar aktor yang seharusnya memiliki dominasi dalam sebuah sistem. Untuk konteks yang lebih luas misalnya keterlibatan elemen-elemen dalam isu-isu bersama atau kebijakan di level negara. Di dalamnya terlibat masyarakat sipil dan juga pasar yang secara tidak langsung memberikan pengaruhnya kepada negara/ pemerintah. Di sisi lain, negara dan juga pasar tidak serta merta terlepas dari dinamika yang ada di dalam masyarakat sipil. Pun demikian dengan realitas yang sedang bermain di tataran pasar atau pebisnis, mereka dalam kenyataannya juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada aktor-aktor yang ada di negara dan juga masyarakat sipil.

Konteks kepemimpinan dalam interaksi pembuatan kebijakan oleh karenanya menjadi menarik untuk dikaji, karena melibatkan negara, pasar dan masyarakat sipil. Ketiganya saling berinteraksi untuk mengajukan kepentingan mereka masing-masing agar dapat diakomodir oleh kebijakan yang akan diambil sehingga legitimate. Untuk menghindari konflik kepentingan yang kemudian justru menyebabkan kepentingan yang sama dan lebih besar terabaikan, maka ketiga elemen ini harus dapat disatukan dalam satu gagasan penyelesaian masalah bersama. Ketiganya yang selama ini terpisah dan saling mendahulukan kepentingannya sendiri, perlu menyatukan visi untuk mencari jalan keluar dari problematika yang ada untuk terwujud kebijakan bersama.

Model kepemimpinan yang demikian sedikit banyak menyerupai dengan konsep kepemimpinan transformatif atau melayani. Dalam artian, tidak hanya negara yang memiliki otoritas kemudian memberikan pelayanan kepada publik secara optimal, melainkan juga bagaimana pasar dan masyarakat sipil juga

memberikan pelayanan kepada *others* sehingga mereka tidak memaksakan kepentingannya untuk tercapai, tetapi mendahulukan solusi bersama. Kepemimpinan yang transformatif dan melayani, dalam hal ini tidak lagi sekadar siapa melayani siapa melainkan juga apa yang bisa diberikan masing-masing aktor.

Dengan tuntutan penyelesaian masalah yang lebih kompleks sekaligus sumber daya yang juga tidak terkumpul di satu aktor, maka kebutuhan untuk berkolaborasi menjadi lebih urgent. Kepemimpinan yang selama ini identik dengan kekuasaan menjadi perlu untuk diperbincangkan kembali mengingat penyelesaian masalah dalam ruang demokrasi tidak lagi kental dengan warna *top down*, melainkan melalui gagasan yang partisipatif. Partisipatif yang bersifat kritik, penolakan maupun dukungan atas kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan bersama.

Selain partisipasi sebagai wujud relasi antar aktor, hal penting lain justru juga muncul dalam realitas bahwa dalam diri masing-masing aktor juga terdapat peran yang tidak tunggal. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pendekatan kepemimpinan perlu dibaca ulang dari siapa aktor yang berkuasa menuju apa yang mereka perjuangkan bersama. Dikarenakan dalam satu entitas aktor bisa pula terdapat peran yang sebenarnya menjadi domain dari aktor lain. Misalnya, sebagai bagian dari masyarakat sipil, di saat yang sama terdapat aktor yang juga representasi negara dan pasar atau sebaliknya. Sehingga keberadaan multiperan ini menyebabkan isu kepemimpinan menjadi tidak dapat berupa aktor sentris, di satu peran memiliki kuasa di saat yang sama justru menjadi pelaksana.

Berkenaan pula dengan kebijakan penerbitan ilmiah di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan ada merupakan refleksi dari peran aktor yang semula cukup sentral di negara, menjadi kepemimpinan yang menyebar. Bahkan dalam beberapa kondisi, terdapat aktor pemerintah yang memang dilibatkan secara aktif untuk mendampingi masyarakat sipil. Di saat yang sama, masyarakat sipil juga dilibatkan secara aktif dalam program-program pemerintah, termasuk juga adopsi program yang terinspirasi dari kegiatan masyarakat sipil.

Program-program yang diadopsi oleh pemerintahan maupun masyarakat sipil dan pasar secara mutualistik ini menunjukkan bahwa sebenarnya aktor-aktor dalam pembuat kebijakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan lebih jauh, masing-masing di antara mereka saling mengisi. Gagasan yang dimiliki oleh aktor kemudian justru menjadi sumber penggerak bagi aktor partisipan kebijakan yang membuat mereka bisa saling berinteraksi, baik dalam konteks saling mendukung maupun saling menegasikan.

Pertanyaan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku masyarakat sipil dan bagaimana mereka berinteraksi dengan negara dan pasar. Lebih lanjut menjelaskan terkait dinamika di dalam masyarakat sipil terkait dengan pola kepemimpinan di dalam merespon isu global tersebut. Khususnya terkait dengan ide-ide yang bersinggungan langsung dengan persoalan literasi ilmiah di Indonesia.

Masyarakat sipil biasanya diidentikkan dengan organisasi yang terpisah dari negara dan pasar, dan bahkan dalam beberapa kajian disebutkan sebagai elemen yang berseberangan dengan pemerintah (Foley dan Edwards, 1996; Skocpol, 1997). Di sisi lain disebutkan bahwa masyarakat sipil juga menjadi bagian dari hegemoni negara (Fonseca, 2016) atau juga dikarenakan sudah satu visi mereka menjadi tidak lagi berseberangan (Vogel, 2016). Namun demikian, dalam konteks penerbitan ilmiah di Indonesia, keberadaan Sains Terbuka ternyata selain memberikan kritikan juga memberi masukan dan berkolaborasi dengan pemerintah. Hal ini disebabkan karena keanggotaannya yang cair dan berasal tidak saja independen masyarakat sipil, melainkan juga dari negara dan pasar. Selain itu ide-ide yang diusung juga sebagiannya sejalan dengan apa yang menjadi agenda negara dan pasar/ekonomi.

Lebih lanjut, efektifitas respon atas kebijakan penerbitan ilmiah merupakan kesepakatan masyarakat sipil, negara dan pasar. Perlu didudukkan respon ini sebagai analisis bahwa gagasan yang muncul tidak dengan satu otoritas khusus yang dalam hal ini RistekDikti. Baik pasar maupun masyarakat sipil ikut terlibat dalam respon tersebut. Oleh karenanya, pendekatan dalam

menjelaskan kepemimpinan dalam konteks kebijakan penerbitan ilmiah tidak lagi berpusat pada aktor, melainkan pada bagaimana pandangan ketiganya sama dan merespon dengan cara yang sama.

Penelitian ini ditujukan untuk menjawab: (1) **Bagaimana gap teoritik yang ada terkait masyarakat sipil dan kelahiran ide atau diskursus di ruang publik sebagai penggerak kerja masyarakat sipil dalam berinteraksi dengan negara dan pasar.** Merujuk pada ruang publik yang menjadi arena masyarakat sipil melalui interaksi Sains Terbuka dengan negara dan pasar dalam merespon wacana global dan sekaligus kebijakan nasional dan (2) **Bagaimana, diskursus terkait kepemimpinan ide yang menjadi bagian transformasi kepemimpinan berbasis aktor, menuju kepemimpinan berbasis interaksi gagasan.** Termasuk bagaimana kebijakan publikasi ilmiah direspon oleh aktor-aktor dengan kesiapan, prinsip kerja dan sumber daya yang berbeda-beda. Sebagai bagian dari interaksi masyarakat sipil, negara dan pasar/ekonomi.

Kebaruan Penelitian

Berdasarkan pelacakan database Google Cendekia hingga tahun 2019, penelitian terkait masyarakat sipil masih memperlihatkan bahwa masyarakat sipil merupakan bagian yang terpisah, atau sesekali berhimpitan dengan negara dan/atau pasar (Klein dan Lee, 2019). Belum ada penelitian yang menjelaskan ikatan intens masyarakat sipil, negara dan pasar. Khususnya ketika dilihat dari sudut pandang diskursus ide dan bukan interaksi aktor secara fisik. Di sisi lain, secara spesifik Sains Terbuka sebagai bagian dari masyarakat sipil yang terlibat dalam kebijakan penerbitan ilmiah di level nasional belum pernah ditemukan sebelumnya. Keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan penerbitan ilmiah merupakan hal baru, di mana keumuman yang ada mereka lebih banyak terlibat dalam urusan asosiasi keilmuan dan perkembangan berbasis ilmu yang dialami (misal: Asosiasi Ilmu Politik, Asosiasi Teknik (IEEE Regional Indonesia), Komunitas Sains Terbuka, dll).

Meningkatkan Ulang Wacana, Memperluas Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Membaca Ulang Masyarakat Sipil

Kurun beberapa dekade terakhir, konsep masyarakat sipil menjadi kajian yang populer dan menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Hal ini diperkuat dengan keruntuhan komunisme atau totalitarisme di akhir 80an yang menjadi ideologi tandingan dari liberalisme dan demokrasi (Cohen dan Arato, 1992). Terjadi pergeseran, yang semula di beberapa negara terjadi dominasi sistem kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kini muncul muncul berbagai elemen masyarakat yang berkelompok maupun sendirian muncul sebagai representasi kekuatan politik. Di sisi lain, ketika ideologi itu jatuh, yang muncul tidak sekadar liberalisme dan demokrasi semata, melainkan juga berubahnya kekuatan negara dalam mengatur warga yang menjadi lebih kompromistis.

Kekuatan negara yang relatif kompromistis ini bukan tanpa sebab. Gelombang liberalisme dan demokrasi menghadirkan kekuatan-kekuatan sosial politik yang lambat laun menguat seiring dengan interaksi mereka, baik di dalam negara maupun jejaring mereka hingga di manca negara. Individu-individu mulai memunculkan kekuatan sosial politik dan menjadikan kekuatan itu dalam bentuk formal organisasi. Semula interaksi itu antar individu berupa elit, semakin lama elit-elit tersebut menciptakan organisasi-organisasi atau agensi kepentingan.

Kemunculan masyarakat sipil dalam demokratisasi sendiri kemudian hampir bisa diidentikkan dengan kemunculan organisasi-organisasi di dalam suatu negara. Organisasi tersebut merupakan bagian dari masyarakat sipil, yang memperkuat diri melalui aktivitas mereka, dengan tujuan mendukung proses demokratisasi. Namun demikian, visi ini oleh beberapa kalangan tidak saja dianggap sebagai representasi demokratisasi, melainkan juga liberalisme. Mereka tidak saja terlibat dalam proses demokrasi yang formal dan terlembaga, melainkan juga mengakomodir kepentingan dari segala arah, dari siapapun.

Demokrasi dalam kerangka liberalisme meniscayakan kehadiran masyarakat sipil sebagaimana pemikiran beberapa intelektual, seperti Alexis de Tocqueville (1820), Robert Putnam

dkk (1994), Samuel Huntington (2006) dll. Adanya masyarakat sipil dianggap merupakan bagian penting dari konsolidasi demokrasi. Dibutuhkan masyarakat sipil yang bersemangat dan otonom dan negara yang efektif yang mampu menyeimbangkan tuntutan berbagai kelompok kepentingan. Di saat yang bersamaan, masyarakat sipil dianggap sebagai ranah kehidupan sosial yang terorganisir yang bersifat sukarela, swadaya, sebagian besar mandiri, otonom dari negara, dan diikat oleh tatanan hukum atau seperangkat aturan bersama.

Masyarakat sipil yang kuat dan majemuk diperlukan untuk berjaga-jaga terhadap eksekusi kekuasaan negara, tetapi juga untuk melegitimasi otoritas negara ketika didasarkan pada supremasi hukum. Dengan menyalurkan dan memproses tuntutan dan keprihatinan kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda kepada negara, masyarakat sipil mendukung negara yang efektif dan efisien, memastikan legitimasi, akuntabilitas, dan transparan (Baker, 1998). Masyarakat sipil dengan kerjanya dalam mengontrol negara secara efektif, memperkuat kapasitas negara untuk tata pemerintahan yang baik. Dengan demikian, teori demokrasi liberal melihat negara yang kuat dan masyarakat sipil yang kuat terpisah satu sama lain, namun saling melengkapi.

Bergantungnya gagasan ini pada demokrasi liberal pada dasarnya juga mengalami tantangan, khususnya di negara-negara yang tidak sepenuhnya masuk dalam kategori “demokratis” atau “Full Democracy”, melainkan “Flawed Democracy” dan “Hybrid Regime” (EIU, 2019). Terdapat kekhasan yang menjadi fenomena politik di masing-masing negara. Termasuk bagaimana kekuatan informal sebenarnya juga menjadi aktor yang selain terikat pada masyarakat sipil juga menjadi bagian yang tidak terpisah dari negara. Oleh karenanya, keberadaan masyarakat sipil dalam ruang demokrasi tidak dapat dimaknai sebagai alat kontrol negara, melainkan juga sebagai elemen yang mendukung pemerintah dalam bentuk kolaborasi. Kontrol dan kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil muncul dalam bentuk ruang publik.

Salah satu relasi antara negara dan masyarakat sipil yang dinamis adalah kemunculan aktor-aktor lintas organisasi (Berman, 1997; Edwards dkk, 2001). Masyarakat sipil tidak merepresentasi

organisasi tertentu. Mereka diikat dengan beragam kepentingan asal dan tetap dengan merujuk pada lembaga masing-masing. Kesemuanya memberikan kontribusi tidak sebagai organisasi tempat mereka bekerja melainkan sebagai bagian dari jejaring yang ditujukan untuk menampilkan eksistensi mereka (Castells, 2008). Oleh karenanya, masukan bisa saja berupa kritik maupun dukungan kepada negara.

Sebagaimana tujuan kemunculannya, masyarakat sipil dalam konteks kekinian sosial politik menampilkan dinamika dalam mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang adil dan merata, kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia (Encarnación, 2000; Kidd, 2002). Namun demikian, dalam banyak kasus, masyarakat sipil menghadapi pembatasan yang semakin ketat. Baik melalui pengawasan media yang ketat atau hambatan regulasi yang membebani masyarakat sipil, pemerintah di banyak negara membatasi ruang bagi masyarakat sipil - khususnya dalam arena memajukan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karenanya, seringkali diidentikkan bahwa masyarakat sipil sebagai oposan negara (Chandhoke, 1995; Fakhri, 1996). Oposisi ini dalam beberapa literatur diwujudkan dalam bentuk organisasi di luar negara dan pasar (Bank Dunia, 2013; Forum Ekonomi Dunia, 2013; Uni Eropa, 2018).

Relasi negara-masyarakat sipil lain yang juga merupakan bagian dari kritik Gramsci atas masyarakat sipil adalah hegemoni negara (Fonseca, 2016). Pada titik tertentu, negara tidak lagi menganggap masyarakat sipil sebagai ancaman, melainkan sebagai partner dalam konteks klien atau yang terhegemoni nilai-nya. Strategi yang digunakan adalah kesamaan ide yang memungkinkan negara mengalihkan perannya ke masyarakat sipil, sehingga masyarakat sipil bisa menerima kinerja pemerintah karena sesuai dengan value mereka (Vogel, 2016). Padahal dalam pandangan Gramsci, ini merupakan bentuk hegemoni negara atas masyarakat sipil. Meskipun dapat juga dilihat sebagai bentuk kolaborasi yang terstruktur, dengan negara ada di posisi atas.

Sebagai konsekuensi sistem pemerintahan yang demokratis, demokrasi deliberatif memungkinkan kebijakan atau tindakan pemerintah untuk diuji di ruang publik. Berkenaan dengan relasi

negara dengan masyarakat sipil, terdapat hubungan yang dinamis (Olsen, 2009). Pemerintahan yang demokratis terdiri dari komponen-komponen yang terorganisir dengan relasi yang bergeser satu sama lain, dan pemerintahannya adalah tindakan kolektif terstruktur yang mengoordinasi banyak aktor, organisasi, dan sumber daya. Dengan berjalannya mekanisme ini, maka kebijakan-kebijakan sesungguhnya merupakan relasi antar apa yang dibawa aktor dan bukan karena keberadaan aktor itu sendiri.

Diskursus Kepemimpinan

Kajian kepemimpinan yang selama ini muncul, menjelaskan relasi manajer-karyawan (Taylor, 2004; Knouse dan Carson, 1993) hingga kepemimpinan transformatif (Burns, 2004) yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan dari anggotanya (Greenleaf, 2002). Oleh karenanya dapat ditarik garis merah bahwa kepemimpinan selama ini dikaji dalam isu manajerial dan cenderung pada kajian aktor. Padahal di era digital, masing-masing aktor tidak lagi secara intensif bertemu, dan gagasan bisa saja muncul dari segala arah, tidak terpusat pada satu aktor tertentu. Oleh karenanya, menjadikan aktor sebagai elemen sentral dalam isu kepemimpinan merupakan hal yang perlu dikaji ulang.

Seperti dicatat oleh Day (2000), memahami perbedaan antara mengembangkan pemimpin dan mengembangkan kepemimpinan berpotensi menjadi penting. Pengembangan pemimpin berfokus pada pengembangan pemimpin individu ataupun aktor sedangkan pengembangan kepemimpinan berfokus pada proses pengembangan yang secara inheren melibatkan banyak individu (mis., Pemimpin dan pengikut atau di antara rekan-rekan dalam tim kerja yang dikelola sendiri). Mengembangkan pemimpin individu/aktor dan mengembangkan proses kepemimpinan yang efektif melibatkan lebih dari sekadar memutuskan pendekatan kepemimpinan mana yang akan digunakan untuk memotivasi pengembangan yang efektif. Ini karena perkembangan manusia melibatkan serangkaian proses yang kompleks.

Sebagai konsekuensi bahwa masyarakat sipil dan juga kepemimpinan masih menjadi kajian aktor, maka kepemimpinan

secara umum digambarkan sebagai bagian dari korporasi dan pelatihan untuk pengembangan masyarakat sipil (Deans dkk, 2006). Lebih mendalam bahwa kajian atas masyarakat sipil identik dengan pembangunan dari negara yang tergolong lebih maju kepada negara-negara miskin atau berkembang, termasuk organisasi atau korporasi di dalamnya (Andreadis, 2002; Cosgrove, 2010).

Sebagai contoh, di Indonesia, relasi antara pemerintah, pasar dan masyarakat akademik juga dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan yang mulai bergeser di era disrupsi. Era internet dan digital memungkinkan aktor-aktor pembuat kebijakan tidak harus bertemu langsung, melainkan yang berinteraksi secara lebih cepat adalah gagasan mereka (Margetts dkk, 2015). Apa yang sesungguhnya muncul sebagai sebuah kebijakan, selain merupakan relasi di ruang publik juga menjadi salah satu penanda bahwa ikatan antar aktor lebih didominasi oleh ikatan ide. Kajian ruang publik selama ini meniscayakan ada relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil di ruang publik. Namun, kajian yang mendiskusikan tentang peran dan gerakan masyarakat sipil berbasis ide dan jaringan di dalam ruang publik, masih terbatas.

Padahal, merujuk pada gagasan *disruptive leadership* misalnya dapat dikatakan bahwa apa yang menjadi poin dalam kepemimpinan kontemporer bukan lagi pada aktornya, melainkan pada kemampuan melihat dan menyelesaikan masalah. Poin ide atau gagasan dalam organisasi dalam merespon persoalan justru menjadi lebih penting dalam mengamati organisasi saat ini. Organisasi tidak lagi identik dengan aktor yang memimpin, melainkan ide berupa nilai dan norma yang menggerakkan mereka. Yorkovich menuliskan tentang *disruptive leadership* sebagai respon atas gagasan *disruptive innovation* dari Clayton Christensen (Bower dan Christensen, 1995). *Disruptive leadership* digambarkan sebagai: melihat masalah dengan cara baru, menemukan peluang dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan, menerima kegagalan, kesabaran untuk perubahan, dan berharap cepat untuk mendapatkan dampak yang berarti.

Avolio dan Gardner (2005) di sisi lain juga menyoroti kekuatan lingkungan dan organisasi yang telah membentuk

kepemimpinan dan pengembangannya. keduanya menggambarkan persamaan dan ciri-ciri yang menentukan dari teori kepemimpinan dibandingkan dengan perspektif kepemimpinan lainnya (misal: Kepemimpinan transformasional, karismatik, pelayan, dan spiritual). Dalam nada ini, model hubungan antara kepemimpinan otentik, pengembangan pengikut, dan kinerja pengikut disajikan (Gardner dkk, 2005). Model yang diusulkan menyoroti proses perkembangan kesadaran diri dan pengaturan diri pemimpin dan pengikut, serta pengaruh sejarah pribadi para pemimpin dan pengikut pada kepemimpinan dan pengikut yang otentik.

Isu kepemimpinan ini kemudian menjadi kajian penting ketika terjadi pergeseran pola kepemimpinan yang beranjak dari peran aktor menuju interaksi gagasan dan aksi kolaborasi. Sutherland (2013) misalnya, menggugat model kepemimpinan berbasis aktor dengan mengajukan kritik berbasis anarkisme. Menempatkan setiap orang dalam organisasi dalam posisi yang sama, dan harus terlibat dalam organisasi secara partisipatif. Diskursus terkait ideologi, identitas dan pemaknaan kepemimpinan lebih banyak mempengaruhi kepemimpinan sebuah organisasi, dibandingkan siapa yang memimpin. Hal ini sejalan dengan Raelin (2016) dan Crevani dkk (2010) yang menyampaikan bahwa kepemimpinan adalah persoalan praktik dan interaksi. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa kepemimpinan bisa saja berjalan tanpa pemimpin, melainkan dengan agensi-agens kolektif.

Kepemimpinan dengan demikian, selain mengalami pergeseran dari aktor menuju gagasan atau ide, adalah juga terkait dengan kuat tidaknya sebuah gagasan diajukan. Terjadi interaksi di ruang publik, khususnya tentang apa yang dianggap penting dan kemudian menjadi wacana bersama dan juga hal-hal yang mungkin dianggap penting hanya oleh sebagian elemen sehingga menjadi kepentingan sendiri. Ketika ide-ide tersebut beririsan dan saling menguatkan di antara semua elemen maka hal tersebut merupakan bagian dari bentuk dorongan bagi masing-masing menjalankan kepentingan yang sama. Hanya saja yang menjadi bagian penting adalah apakah gagasan tersebut memang sedari awal sama-sama dimiliki, atautkah saling menginspirasi. Ketika saling menginspirasi dan menjadi ide bersama maka pada saat itulah sebenarnya

kepemimpinan bergeser dari aktor ke ide. Tidak penting lagi siapa yang memiliki gagasan, melainkan yang lebih penting adalah yang disuarakan merupakan gagasan bersama.

Kerangka Teoritis

Secara umum gambaran tentang masyarakat sipil merupakan adopsi dari masyarakat liberal yang mendudukan relasi masyarakat sipil dengan negara dan juga pasar/ekonomi. Setidaknya terdapat tiga pola yang dianalisis oleh Klein dan Lee (2019) terkait dengan relasi ini. Disebutkan (Skema 1) bahwa interaksi masyarakat sipil dengan negara dan pasar: **pertama** diidentifikasi sebagai *politics of influence*. Masyarakat sipil tidak terikat dengan negara maupun pasar, berdiri sendiri sebagai entitas yang independen. Terhadap keduanya, masyarakat sipil berjarak dan memberikan reaksi mendukung maupun menolak. Begitu pula sebaliknya, negara dan pasar melakukan reaksi yang sama terhadap masyarakat sipil.

Pola **kedua** diidentifikasi sebagai *politics of substitution*. Terdapat pandangan bahwa masyarakat sipil, negara dan pasar pada dasarnya seringkali terkait satu sama lain. Negara dapat menjadi bagian dari masyarakat sipil. Terkadang masyarakat sipil menjadi bagian tersubordinasi oleh negara dan sebaliknya. Hal ini disebabkan di antara negara dan masyarakat sipil berinteraksi dengan nilai yang sama persis dan saling menjadi bagian. Contoh dari ini misalnya keberadaan masyarakat sipil di Indonesia yang terlibat dalam pendirian negara. Nilai-nilai yang ada tentu saling *over lap*. Atau sebaliknya, negara menciptakan masyarakat sipil melalui pembentukan organisasi yang kemudian menciptakan asosiasi-asosiasi keilmuan maupun profesi.

Relasi **ketiga**, Pandangan terkait hubungan masyarakat sipil, negara dan pasar yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan mendominasi secara parsial. Pada tahap-tahap tertentu, keberadaan masyarakat sipil mempengaruhi apa yang dikerjakan oleh negara melalui keberadaan mereka di dalam sistem, pun sebaliknya demikian. Merujuk pada konteks negara demokrasi hal tersebut memang dimungkinkan, terutama jika melihat kekuatan politik dari masing-masing. Bisa jadi ada aktor dari negara menjadi motor

di masyarakat sipil, aktor masyarakat sipil yang menjadi bagian negara, dst. Namun demikian, masuknya aktor masyarakat sipil ke negara (dan sebaliknya) tidaklah berlangsung lama. Ada batasan waktu yang disebabkan bahwa dalam sistem yang demokratis kepemimpinan dalam suatu sistem harus dibatasi. Umumnya, pembatasan ini terjadi dalam dua periode pemilihan.

Skema 1. Teorisasi Masyarakat Sipil
(Sumber: Klein dan Lee, 2019)

Namun demikian, apa yang menjadi rangkuman Klein dan Lee atas relasi masyarakat sipil, negara dan pasar/ekonomi adalah menganggap bahwa ketiganya sebagai elemen yang benar-benar terpisah satu sama lain, dan sesekali berinteraksi. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa bisa saja aktor di dalam negara merupakan bagian dari pasar, bagian dari masyarakat sipil, dst. Hal ini misalnya dapat dilacak melalui statement dan kebijakan yang dimunculkan oleh masing-masing aktor. Tanpa harus berada di dalam satu posisi tertentu, setiap aktor bisa saja mengungkapkan ide atau gagasan yang bersinggungan dengan posisi lain, dengan tetap membawa agenda tempat dia saat ini berada.

Pandangan yang cukup umum di negara *flawed* demokrasi seperti di Indonesia, *politics of occupation* dimungkinkan muncul melalui pengaruh secara langsung. Karena memang tidak ada aturan yang melarang bahwa masyarakat sipil untuk menjadi bagian dari negara dan juga pasar. Namun, terdapat hal yang belum terjawab pada pemetaan Klein dan Lee ketika dalam realitasnya, apa yang diungkapkan oleh aktor masyarakat sipil, negara dan pasar itu sesungguhnya sangat mungkin terdapat irisan. Dikarenakan apa yang menjadi harapan dari masyarakat sipil, negara dan pasar bertemu pada isu-isu tertentu. Tanpa harus berada di posisi yang berbeda lain.

Oleh karenanya, pemaknaan atas relasi ini tidak dapat dilihat sebagai pemaknaan relasi aktor, melainkan apa yang dibawa oleh aktor, yaitu ide. Bisa jadi ketika berada dalam posisi masyarakat sipil, sebenarnya di saat yang sama menjadi aktor dari negara maupun pasar/ekonomi. Membawa gagasan yang menjadi domain negara dan juga pasar/ekonomi. Pun demikian, ketika menjadi aktor di dalam masyarakat sipil, pada hakikatnya masing-masing juga membawa peran lain, yang bisa saja merepresentasi pasar maupun negara (Skema 2). Irisan gagasan inilah yang menyebabkan ketiganya tidak dapat serta merta dipisahkan.

Skema 2.

Teorisasi Kepemimpinan Ide Masyarakat Sipil berbasis Irisan Gagasan

Berkenaan dengan Sains Terbuka, kemudian dapat dilihat menjadi dua konteks: **pertama** meskipun sebagai aktor yang berbasis masyarakat sipil, akan tetapi pegiatnyanya terdiri pula dari pasar dan negara. Oleh karenanya ketika melihat interaksi ketiga elemen dalam kebijakan penerbitan ilmiah, tidak dapat dilihat pada perwakilan siapa yang sedang mengemukakan gagasan. Karena bisa jadi meskipun merupakan representasi masyarakat sipil, pada hakikatnya sebagiannya juga merupakan bagian dari negara. Misalnya pegiat Sains Terbuka yang di saat yang sama merupakan dosen atau staf di perguruan tinggi negeri atau lembaga milik pemerintah, seperti staf LIPI atau juga kemenristekDikti. Ada juga yang menjadi bagian dari ekonomi/pasar, sebagai pebisnis publikasi.

Kedua, karena terdapat perhatian yang sama atas satu isu, maka sangat dimungkinkan ada irisan gagasan, cara melihat masalah, respon dan tindakan sebagai bagian dari diskursus ruang publik. Di sisi lain terdapat juga irisan hanya dua entitas, atau ada juga yang di luar keduanya yaitu yang memang hanya merepresentasi ide masing-masing secara sepihak. Pada tahap ini, tidak lagi penting siapa yang menyampaikan gagasan atas

persoalan literasi ilmiah di Indonesia, melainkan apa yang sedang diperjuangkan. Oleh karenanya kepemimpinan dalam masyarakat sipil dengan demikian perlu dilacak tidak sebagai aktor yang sedang memberikan dukungan maupun kritik atas kebijakan. Lebih penting lagi apakah yang menjadi ide tersebut merupakan kepentingan bersama ataukah parsial masing-masing elemen. Pada titik inilah teorisasi Kepemimpinan Masyarakat Sipil sebagai Irisan Ide menjadi penting.

Ide bersama (Skema 2) adalah irisan ide yang sama dari masyarakat sipil, negara dan pasar (Poin 1). Meskipun berada pada posisi yang berbeda, antara masyarakat sipil, negara dan pasar, sesungguhnya ada gagasan yang sama (Poin 2) dan gagasan yang diusung secara mandiri oleh masing-masing aktor (Poin 3). Dengan kata lain, **ada kepemimpinan sebagai representasi irisan gagasan yang menggerakkan kerja masyarakat sipil, yang bersumber dari negara maupun pasar. Dan Irisan inilah yang kemudian menggerakkan kerja dari masyarakat sipil dalam mencapai tujuan mereka.**

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed method*. Dengan penekanan pada studi kasus yang dominan pada pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dan Clark (2017) penelitian campuran merupakan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. *Mixed method* dipilih untuk memaksimalkan informasi dari dua jenis penelitian yang ada, sehingga harapannya sebagai penelitian literatur secara kualitatif dan penguatan data kuantitatif atas Sains Terbuka, sehingga didapatkan informasi yang mampu memetakan kajian secara lebih komprehensif.

Strategi dalam optimalisasi *mixed method* sendiri dipilih penggunaan *sequential explanatory design* (Skema 3). *Sequential explanatory design* (Creswell dan Clark, 2017) dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif pada tahap pertama dan mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang dikembangkan dari hasil analisis data kuantitatif pada tahap kedua. Informasi awal dan yang bersifat umum muncul pada data

kuantitatif dan kemudian melalui pencampuran data, pengolahan data kuantitatif menjadi bahan untuk melakukan pengolahan data kualitatif. Dalam artian, data-data kuantitatif dielaborasi menggunakan temuan data kualitatif (utamanya dari wawancara mendalam). Walaupun dua bentuk data dikerjakan secara terpisah terpisah namun tetap berhubungan, hal ini disebabkan memang penelitian saling berkaitan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan data, digunakan juga pendekatan *purposive sampling method* (Ritchie dkk, 2013). Pemilihan nara sumber diambil berdasarkan potensi informasi yang ada, baik nara sumber *indepth interview* dan responden survey yang juga memiliki irisan peran.

Skema 3. Alur Penelitian

Responden untuk penelitian kuantitatif adalah pegiat Sains Terbuka khususnya yang masuk dalam tim Sains Terbuka Indonesia. Sedangkan nara sumber kualitatif akan dibagi menjadi tiga kelompok besar: (1) Pemerintah, dalam hal ini Kemristek Dikti secara spesifik Subdit Fasilitasi Jurnal Ilmiah, LIPI, Komisi Informasi dan Kementrian yang sudah dengan baik membuka data untuk publik (2) Pasar/Ekonomi, dalam hal ini beberapa organisasi penyedia pendampingan pengelolaan jurnal dan publikasi ilmiah,

dan (3) dari masyarakat sipil, selain dari pegiat Sains Terbuka pada yang terafiliasi ke Perguruan Tinggi, lembaga non Perguruan Tinggi maupun peneliti independen. Selain ketiganya, penelitian ini juga akan diperkuat dengan data yang diambil dari asosiasi keilmuan maupun organisasi lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan penerbitan ilmiah di Indonesia. Misalnya: Asosiasi Ilmu Politik, Asosiasi Teknik (IEEE Regional Indonesia), Komunitas Sains Terbuka, dll.

Data

Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan peta informasi dari kelompok besar pegiat Sains Terbuka di seluruh daerah melalui survey online. Sedangkan penelitian kualitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah ruang publik atas kebijakan muncul melalui interaksi Sains Terbuka sebagai masyarakat sipil dengan stakeholder lain dalam merespon isu kebijakan penerbitan ilmiah di Indonesia secara lebih spesifik dari aktor-aktor kunci. Termasuk di dalamnya bagaimana kolaborasi sekaligus kritikan konstruktif terhadap pemerintah untuk meningkatkan mutu penerbitan di Indonesia dalam proses pencitraan institusi Pendidikan Tinggi dan negara. Termasuk bagaimana irisan gagasan bisa muncul dan menjadi motor penggerak bagi Sains Terbuka dalam menjalankan visi mereka.

Pada penelitian *participatory research* (Kindon dkk, 2007) data dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, sumber tersebut di antaranya adalah dokumentasi, catatan arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan artefak fisik. Namun, pada tahapan penelitian kualitatif sumber data utama dilakukan dengan observasi yang diperkuat dengan wawancara kepada informan-informan kunci dan analisis dokumen kualitatif melalui sumber media maupun kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan. Untuk kemudahan memetakan irisan-irisan gagasan yang ada, peneliti menggunakan tools Atlas yang memudahkan pelacakan gagasan-gagasan apa yang sering muncul dari negara, pasar dan masyarakat sipil secara bersamaan, irisan dua elemen maupun yang hanya disuarakan masing-masing.

Kontribusi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan akan memiliki dua kontribusi penting. *Pertama*, pendekatan teoritis yang akan digunakan untuk membantu menganalisis perilaku masyarakat sipil yang dinamis, adaptif atas gagasan dari luar. Sebagai kontradiksi dari pola masyarakat sipil yang saat ini berkembang yaitu terpisah, berhadap-hadapan dengan negara dan pasar. Dengan pendekatan ini pula maka kebijakan yang diambil pemerintah akan menjadi diskursus di ruang publik sebelum dibuat dan kemudian diimplementasikan. Bukan sebagai bagian dari tugas negara sendirian untuk mengambil keputusan dan melaksanakannya. Utamanya adalah menjawab bagaimana ide bersama sebagai *driver* sebuah pergerakan dalam merespon isu yang berkembang di masyarakat. Kepemimpinan yang selama ini dianggap muncul dari aktor, terlihat sebagai sebuah proses gagasan yang beririsan dari berbagai aktor. Kontribusi *kedua* dari penelitian ini adalah bagaimana menciptakan relasi yang mutualistik antara negara, pasar dan masyarakat sipil sehingga ketiganya dalam berkolaborasi dengan lebih baik untuk mewujudkan kebijakan yang tidak timpang dikarenakan mengakomodir lebih banyak gagasan dan kepentingan.

Referensi

- Andreadis, N. A. (2002). Leadership for civil society: Implications for global corporate leadership development. *Human Resource Development International*, 5(2), 143-149.
- Antlöv, H., & Wetterberg, A. (2011). Citizen engagement, deliberative spaces and the consolidation of a post-authoritarian democracy: The case of Indonesia. *International Centre for Local Democracy, Swedish International Centre for Local Democracy, Working Paper*, (8).
- Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. *The leadership quarterly*, 16(3), 315-338.

- Baker, G. (1998). Civil society and democracy: the gap between theory and possibility. *Politics*, 18(2), 81-87.
- Bank Dunia (2013), World Bank-Civil Society Engagement.
- Berman, S. (1997). Civil society and political institutionalization. *American Behavioral Scientist*, 40(5), 562-574.
- Bower, Joseph B. dan Chistensen, Clayton (1995), Disruptive Technologies: Catching the Wave, Diambil dari <https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave>.
- Burns, J. M. (2004). *Transforming leadership: A new pursuit of happiness* (Vol. 213). Grove Press.
- Castells, M. (2008). The new public sphere: Global civil society, communication networks, and global governance. *The annals of the american academy of Political and Social Science*, 616(1), 78-93.
- Chandhoke, N. (1995). *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*. Institut Tafsir Wacana (ISTAWA).
- Cohen, J., & Arato, A. (1992). Politics and the Reconstruction of the Concept of Civil Society. *Cultural-political interventions in the unfinished project of enlightenment*, 121-142.
- Cosgrove, S. (2010). *Leadership from the margins: Women and civil society organizations in Argentina, Chile, and El Salvador*. Rutgers University Press.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Crevani, L., Lindgren, M., & Packendorff, J. (2010). Leadership, not leaders: On the study of leadership as practices and interactions. *Scandinavian journal of management*, 26(1), 77-86.
- Day, D. V. (2000). Leadership development: A review in context. *The leadership quarterly*, 11(4), 581-613.
- De Tocqueville, A. (1982). *Alexis de Tocqueville on democracy, revolution, and society*. University of Chicago Press.
- Deans, F., Oakley, L., James, R., & Wrigley, R. (2006). Coaching and mentoring for leadership development in civil society. *Praxis Paper*, 14, 1-37.
- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of democracy*, 5(3), 4-17.

- Economic Intelligent Unit (2019). Democracy index 2018: Me too?. *Political Participation, Protest and Democracy*.
- Edwards, B., Foley, M. W., Foley, M. W., & Diani, M. (Eds.). (2001). *Beyond Tocqueville: Civil society and the social capital debate in comparative perspective*. Upne.
- Encarnación, O. G. (2000). Tocqueville's Missionaries: Civil Society Advocacy and the Promotion of Democracy. *World Policy Journal*, 17(1), 9-18.
- European Economic and Social Committee (2018), The Future Evolution of Civil Society in the European Union by 2030.
- Fakih, M. (Ed.). (1996). *Masyarakat Sipil*. InsistPress.
- Foley, M. W., & Edwards, B. (1996). The paradox of civil society. *Journal of democracy*, 7(3), 38-52.
- Fonseca, M. (2016). *Gramsci's Critique of Civil Society: Towards a New Concept of Hegemony*. Routledge.
- Forum Ekonomi Dunia (2013), The Role of Future Civil Society.
- Greenleaf, R. K. (2002). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974). The public sphere: An encyclopedia article (1964). *New German Critique*, (3), 49-55.
- Hohendahl, P. U., & Silberman, M. (1979). Critical theory, public sphere and culture: Jürgen Habermas and his critics. *New German Critique*, 16(1), 89-118.
- Huntington, S. P. (2006). *Political order in changing societies*. Yale University Press.
- Kidd, A. (2002). Civil society or the state?: Recent approaches to the history of voluntary welfare. *Journal of historical sociology*, 15(3), 328-342.
- Kindon, Sara, Rachel Pain, Mike Kesby (2007). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place*. Routledge.
- Klein, S., & Lee, C. S. (2019). Towards a dynamic theory of civil society: The politics of forward and backward infiltration. *Sociological Theory*, 37(1), 62-88.
- Knouse, S. B., & Carson, K. D. (1993). W. Edwards Deming and Frederick Winslow Taylor: A comparison of two leaders who shaped the world's view of management. *International Journal of Public Administration*, 16(10), 1621-1658.

- Margetts, H. Z., John, P., Hale, S. A., & Reissfelder, S. (2015). Leadership without leaders? Starters and followers in online collective action. *Political Studies*, 63(2), 278-299.
- Olsen, J. P. (2009). Democratic government, institutional autonomy and the dynamics of change. *West European Politics*, 32(3), 439-465.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton university press.
- Raelin, J. A. (2016). Imagine there are no leaders: Reframing leadership as collaborative agency. *Leadership*, 12(2), 131-158.
- Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C. M., & Ormston, R. (Eds.). (2013). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. sage.
- Skocpol, T. (1997). The Tocqueville problem: Civic engagement in American democracy. *Social Science History*, 21(4), 455-479.
- Sutherland, N. (2013, July). Leadership without leaders?. Paper presented at International Conference in Critical Management Studies.
- Taylor, F. W. (2004). *Scientific management*. Routledge.
- Vogel, B. (2016). Civil society capture: Top-down interventions from below?. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 10(4), 472-489.
- Widjajanto, A. (2007). *Transnasionalisasi masyarakat sipil*. PT LKiS Pelangi Aksara.

Progres:

Artikel Ilmiah Terkait:

1. **Siapa Peduli Publikasi Bereputasi di Indonesia?**
(Jurnal Berkala: Ilmu Perpustakaan-Terakreditasi Sinta 2, Proses Review)
2. **Mensinergikan Masyarakat Sipil dan Negara: Sebuah Diskursus Kepemimpinan** (Jurnal Wacana Politik-Terakreditasi Nasional Sinta 2, Proses Review)

Tulisan Populer Terkait:

1. **Membangkitkan Marwah Ilmu**
(Suara Merdeka, 26 Sept 2019)
2. **Scopus (H)apus-(H)apus**
(Suara Merdeka, 30 Nov 2019)
3. **Gejala “Scopus Apartheid”**
(Suara Merdeka, 8 Agust 2019)
4. **“Keistimewaan” Sarjana Sosial**
(Suara Merdeka, 23 Mei 2019)